

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel, terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.

- Penasehat** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Penanggung Jawab** : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
- Ketua Dewan Redaksi** : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi** : 1. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
2. Ahmad Sanusi S.H., M.H.
3. Trisapto Wahyu Agung Nugroho, S.S., M.Si.
4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.
5. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.
6. Imam Lukito, S.T., M.H.
- Redaksi Pelaksana** : 1. Fitriyani, S.H., M.Si.
2. Jaya Laksana, S.E
- Sekretariat** : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
2. Asmadi, S.H.
- Tata Usaha** : Suwartono
- Desain Grafis dan Teknologi Informasi** : 1. Macyudhie, S.T.
2. Risma Sari, S.Kom
3. Saefullah, S.ST, M.Si
4. Agus Priyatna, S.Kom
- Alih Bahasa** : Harry Fonte Sugiarto
(*Interlingua Translation Centre*)

Alamat Redaksi

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

balitbangkumham@gmail.com

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Sistem Pemerintahan Indonesia:
Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945..... 119 - 135
Ahmad Yani
2. Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK) 137 - 150
M. Beni Kurniawan
3. Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo..... 151 - 161
Roy Marthen Moonti, Nurwita Ismail, Julia Kristi Karepoan, Hardianto Djanggih
4. Pelayanan Pembuatan Paspor dalam Kajiannya
Terhadap Teori Manfaat Teknologi Informasi..... 163 - 178
Wilonotomo, Koesmoyo Ponco Aji
5. Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi
di Provinsi Sulawesi Selatan 179 - 197
Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan
6. Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara
pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara 199 - 211
Ahmad Sanusi

TINJAUAN HUKUM (*REVIEW*)

7. Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 213 - 226
Muhaimin

KATAPENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern.

Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada terbitan Volume 12 Nomor 2 Bulan Juli 2018 ini, kami memuat hasil-hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Peradilan, Hukum, dan Keimigrasian. Disamping itu, terdapat satu tulisan tentang Pelayanan dan Informasi Publik (tulisan lepas/review) yang terbit kali ini. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang masuk dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia, serta unit lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

REDAKSI

Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

**p-ISSN 1978 - 2292
e-ISSN 2579 - 7425**

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM**

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ahmad Yani (The School of Laws of Padjadjaran University (SAY n' Partners Lawfirm)

Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

Indonesia currently adopts the presidential government system, that recognizes the separation of powes among the Executive, Legislative and Judicative branches based on the principles of "checks and balances". These rules are provided for in the constitution, howwver, improvements are always be required, in particular those regulating the clear boundaries of the powers and authorities among the three institutions of the state. This research is a normative legal research, that employs juridical normative approach method. In this research, it is the author's intention to identify and review some theories and practices of the implementation of the Indonesian government system based on the 1945's Constitution. Theoretically the powers of the state institutions in Indonesia are guided by the presidential government system, however the practices show that in performing the functions and authorities, the state institutions have failed to reflect that Indonesian government system that separates the powers as dictated by the presidential government system but, closer to the power distribution sistem. Therefore, the provisions set out in the 1945's Constitution should be improved, so that the concepts and the practices can operate in a synchronous way.

Keywords: Theory, Practice, Government, Constitution, Indonesia

Muhammad Beni Kurniawan (Master of Law, University of Indonesia)

Problems in Filling in the Position of the Corruption Eradication Commission Leaders (Critical Discussion to DPR's Power to Elect KPK Leaders)

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

The mechanism of election of KPK Leaders through the DPR, is a form check and balances between the President and DPR powers. However if the DPR in electing KPK Leaders fail to represent the people's voices but instead electing KPK Leaders to protect illegal projects to add to their personal coffers, this circumstance will in turn give raise to problems. KPK will be hard to work objectively due to conflict of interest between KPK Leaders and DPR among others when investigating the members of the House who have chosen them as KPK Leaders. Problem: How is the mechanism of filling in the Position of the Corruption Eradication Commission leaders? The employed research method is juridical normative method using secondary data. The result of the research shows that evaluation is required to the mechanism of filling in the positions of the KPK leaders by means of (1) reinforcing the roles of the Selection Committee (Pansel). In assuring the objectivity and good performance of check and balances in electing the KPK Leaders, the Pansel may have 7 members consisting of the members from government element, DPR element, Judicative element, practitioner element, and academic element. DPR powers should be reduced to only dispatch one of its member to the Selection Committee of KPK leaders. (2) establishing a special independent body in electing KPK Leaders to which the President and the DPR could not make any intervention. The President should have the power to nominate the candidates for the KPK Leaders which will be elected by the Body and inaugurated by means of President Decree.

Keywords: Mechanism, KPK Leaders, Selection Committee

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Roy Marthen Moonti (The School of Laws of Gorontalo University)

Nurwita Ismail (The School of Laws Gorontalo University)

Julia Kristi Karepoan (Agriculture Agency of the Province of Gorontalo)

Hardianto Djanggih (The School of Laws of Tompotika Luwuk Banggai University)

Assessment of Work Performance of State Civil Apparatuses (ASN) in the Agriculture Agency of the Province of Gorontalo

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

The government of the Province of Gorontalo has a great commitment to materialize a good governance that is free of corruption, collusion and nepotism (KKN) by implementing the work performance assessment system SIRANSIJA. The research on the problems centers around, Firstly, the realization of the Work Performance Assessment System of the State Civil Apparatuses (ASN) at the Agriculture Agency of the Province of Gorontalo: Secondly what factors that support and hamper the Work Performance Assessment System SIRANSIJA of the State Civil Apparatuses (ASN) in the Agriculture Agency of the province of Gorontalo. The research employs descriptive qualitative approach by providing careful and factual depiction to the object of the research. The result of the research demonstrates that, Firstly, the Work Performance Assessment System (SIRANSIJA) in the Agriculture Agency of the Province of Gorontalo shows that the State Civil Apparatuses have been effective in their attendances but less effective work performance. Secondly, some influencing factors have been identified, Supporting Factors: Mandatory Fingerprint Attendance System and Features that control the Performance. Obstacle factors: System Error, Fingerprint attending machines broke down, Distance of Assignment and Office Locations, Power Failure, Overlapping main duties and functions. The research recommends the State Civil Apparatuses of the Agriculture Agency of the Province of Gorontalo to improve the SIRANSIJA system for more convenient application.

Keywords: *Assessment, Performance, Gorontalo*

Wilonotomo (Immigration Polytechnic, The Ministry of Laws and Human Rights)

Koesmoyo Ponco Aji (Immigration Polytechnic, The Ministry of Laws and Human Rights)

Passport-related Services in the Light of the Theory of Information Technology Advantages

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

Technology improvements are important so that each country is trying to make their own innovations in technologies to improve the images of their countries. Indonesia with its high population has always been making new innovations in all aspects in particulars the aspect that relate to, immigration information technology. The immigration affairs development cannot be separated from the influence of information technology so that the demand for quality improvement and the development of information technology is one thing that we cannot ignore.

Immigration Information technology in this advanced era has been an interesting subject to discuss, in particular with respect to its functions in public services, one of which is passport-related services. The application of information technology in passport-related services is very helpful in improving the effectiveness and efficiency of the jobs, in addition, the application of information technology is able to improve the security aspect in verifying the authenticity of a document, hence the roles of the information technology here will be the top issues in the digital era for discussions.

Keywords: *Technology, Public Services, Passport, Effectiveness*

**The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Yuliana Primawardani (Law and Human Rights Research and Development Agency)

Arief Rianto Kurniawan (Law and Human Rights Research and Development Agency)

Treatment to International Refugees by the Officials of Immigration Detention Center in the Province of South Sulawesi

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

This research is aimed to collect more information on Treatment of International Refugees under the President Regulation No. 125 of 2016 regarding Treatment to International Refugees, in particular when viewed from the aspects of Institution, administration and Infrastructure. This research uses qualitative approach and conducted in the Province of South Sulawesi. The result concludes that the Treatment of refugees by the Immigration Detention Center of Makassar has been in compliance with the President Regulation No. 125 of 2016, despite of non-conformities, in the aspects of institution, administration and infrastructure, to the duties and authorities of the Immigration Detention Center. This may be seen from the absence of change to the organizational structure, no revision to the applicable Standard Operational Procedures and limited human resources. While the infrastructure has been limited in mobilization and security apparatuses in performing the supervision duties. Consequently, adjustment is required to the institutional structure of the Immigration Detention Center, by providing more infrastructure and immediately revising the Standard Operational Procedures. In addition, a Refugees Service Unit is also required to be established in Makassar as the long arms of the Immigration Detention Center in its watch in view of the location of the Immigration Detention Center which is far away from the refugees shelters.

Keywords: *Treatment to Refugees, Supervision, Immigration Detention Center*

Ahmad Sanusi (Law and Human Rights Research and Development Agency)

Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State's Warehouse of Confiscated Items

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

Administration, another word for Government or commonly known as good governance relates closely to the good provision of public services. Some issues on the items confiscated and seized by the state at the State's Warehouse for Confiscated and Forfeited Items are: inappropriate office building, warehouse and employees; State's Warehouse for Confiscated and Forfeited Items has not been established in every Regency/City; designation of position of State's Warehouse for Confiscated and Forfeited Items to echelon IV; lack of maintenance budget; no expert appraisers/valuers. The method employed in this study is quantitative method with descriptive analysis approach. According to the study there has been unbalanced positioning of the institution when compared to the other related institutions. From the regulation aspect, it has been more internally binding as equal institutions have their own policies. From the aspects of facilities and infrastructure, the warehouses for confiscated and seized goods have not complied with the standards. From the human resource aspect, we have no certified appraisers.

Keywords: *Optimization of Administration, Items Confiscated by the State, State's Warehouse of Confiscated Items*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Muhaimin (The Center for Policies Review and Development, the Laws and Human Rights Research and Development Agency)

Reinforcing Public Service Provision by Public Information Dispute Settlement

Scientific Journal of Law Policy, Volume 12, Number 2, Juli 2018

Public information transparency is an important part of the public service provision that serves also the more important and strategic rights of the citizens to access the other rights, such as how the people can get their rights to education, health, and other services if they cannot get the information correctly and accurately related to the rights, also the roles of the information commission in the regions related to public information transparency in supporting the public services. This paper depicts the relations between information transparency and public services, and it is evident that the information transparency could make the public services provisions better, consequently the presence of the information commission in the regions will be of highly important to settle the information-related disputes in the regions in order to promote better public services. The method employed in this research is juridical normative method, being a legal research conducted by putting the library studies or studies on documents categorized as secondary data, in the forms of primary, secondary, and tertiary legal materials in first priorities. The result of the research shows that public information transparency has become main issues in some regions while the other regions have not made information transparency and participation as important issues. It is necessary to establish the Information Commission in all provinces

Keywords: *Public services, Dispute, Information Commission*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Ahmad Yani (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konseptual dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.

Kata kunci : Teori, Praktek, Pemerintahan, Konstitusi, Indonesia.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

M. Beni Kurniawan (Magister Hukum Universitas Indonesia)

Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Mekanisme pemilihan pimpinan KPK melalui DPR, sebagai bentuk berjalannya *check and balances* antara kekuasaan Presiden dan DPR. Namun jika DPR dalam pemilihan pimpinan KPK tidak merepresentasikan suara rakyat melainkan memilih pimpinan KPK guna melindungi proyek-proyek ilegal untuk menambah pundi-pundi uang mereka, pada posisi inilah akan menimbulkan masalah. KPK sulit berjalan secara objektif karena adanya konflik interest antara pimpinan KPK dan DPR yaitu ketika mengusut anggota Dewan yang telah memilih mereka sebagai Pimpinan KPK. Rumusan masalah Bagaimana mekanisme dalam pengisian jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi terhadap mekanisme dalam pengisian Jabatan Pimpinan KPK yaitu (1) memperkuat Peran Panitia seleksi (Pansel). Dalam menjamin keobjektifan dan jalannya mekanisme *check and balances* dalam pemilihan pimpinan KPK, maka Pansel dapat berjumlah 7 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur DPR, unsur Yudikatif, unsur praktisi, dan unsur akademisi. Kewenangan DPR direduksi yaitu hanya mengajukan salah satu anggotanya untuk menjadi anggota Pansel KPK dari unsur DPR. (2) membentuk badan khusus yang independen dalam pemilihan pimpinan KPK dimana Presiden dan DPR tidak dapat mengintervensi Badan tersebut. Presiden hanya berwenang menetapkan calon pimpinan KPK yang dipilih oleh Badan tersebut dengan Keputusan Presiden.

Kata Kunci: Mekanisme, Pimpinan KPK, Panitia Seleksi

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Roy Marthen Moonti (Fakultas Hukum Universitas Gorontalo)

Nurwita Ismail (Fakultas Hukum Universitas Gorontalo)

Julia Kristi Karepoan (Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo)

Hardianto Djanggih (Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai)

Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja (SIRANSIJA). Permasalahan penelitian berfokus pada, *Pertama*, bagaimana pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo: *Kedua* faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sudah efektif dalam pengoptimalan absensi namun dari segi kinerja masih kurang efektif. *Kedua*, ditemukan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Pendukung: Keharusan Fingerprint dan Fitur yang mengontrol Kinerja Faktor Penghambat: Sistem Error, Mesin Finger Rusak, Jarak Lokasi Tugas dan Kantor, Listrik Padam, Tupoksi Timbang Tindih. Rekomendasi penelitian kepada Aparatur Sipil Negara di Dinas Provinsi Gorontalo agar menyempurnakan sistem SIRANSIJA untuk penggunaan yang lebih merasa nyaman.

Kata Kunci: Pengukuran, Prestasi, Gorontalo

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Wilonotomo (Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)

Koesmoyo Ponco Aji (Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)

Pelayanan Pembuatan Paspor Dalam Kajiannya Terhadap Teori Manfaat Teknologi Informasi
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Peningkatan mutu dari teknologi sangatlah penting dimana setiap negara berusaha untuk berinovasi di bidang teknologi untuk meningkatkan citra bangsanya. Indonesia sebagai negara dengan lalu lintas manusia yang sangat besar selalu berusaha menciptakan inovasi baru di segala aspek di bidang terkait, khususnya dalam aspek teknologi informasi bidang Keimigrasian. Perkembangan di bidang Keimigrasian tidak akan lepas dari pengaruh teknologi informasi sehingga tuntutan untuk meningkatkan mutu dan mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi adalah suatu hal yang tidak dapat kita kesampingkan.

Teknologi informasi bidang Keimigrasian di era yang serba canggih ini menjadi suatu kajian yang menarik, khususnya terhadap fungsinya dalam pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan paspor. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan paspor sangat membantu meningkatkan efektifitas maupun efisiensi pekerjaan, selain itu penggunaan teknologi informasi juga mampu meningkatkan keamanan terhadap suatu keabsahan dokumen, sehingga peranan teknologi informasi disini menjadi hal utama dalam era yang serba digital ini untuk dikaji.

Kata kunci: Teknologi, Pelayanan Publik, Paspor, Efektifitas

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Yuliana Primawardani (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)

Arief Rianto Kurniawan (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI)

Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, khususnya dilihat dari aspek Kelembagaan, ketatalaksanaan dan Infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Penanganan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah sesuai dengan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016, walaupun pada aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan dan infrastruktur masih belum sesuai dengan postur tugas dan kewenangan Rumah Detensi Imigrasi. Hal ini dapat terlihat dari belum adanya perubahan dalam struktur organisasi, belum adanya revisi Standar Operasional Prosedur yang digunakan dan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Begitupun dalam infrastruktur yang masih memiliki keterbatasan perangkat mobilisasi dan perangkat keamanan dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur kelembagaan pada Rumah Detensi Imigrasi, menyediakan infrastruktur dan segera melakukan perbaikan terhadap standar operasional prosedur. Selain itu juga perlu adanya Unit Layanan Pengungsi di Makassar sebagai perpanjangan tangan Rumah Detensi Imigrasi dalam melakukan pengawasan mengingat lokasi Rumah Detensi Imigrasi yang berada sangat jauh dari tempat penampungan pengungsi.

Kata Kunci: Penanganan Pengungsi, Pengawasan, Rumah Detensi Imigrasi

Kata Kunci Bersumber dari Artikel Lembar Abstrak Ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Ahmad Sanusi (Peneliti Madya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM R.I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Tata Kelola dalam kata lain Pemerintahan atau lebih dikenal *good governance* dalam rangka pemenuhan pelayanan public yang baik. Beberapa permasalahan barang sitaan dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan dan Barang Rampasan Negara adalah : belum memadainya gedung kantor, gudang dan pegawai; Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota; eselonering Rupbasan eselon IV; minimnya biaya pemeliharaan; belum ada tenaga ahli penilai/penafsir. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil kajian aspek kelembagaan eselonering yang tidak seimbang (sederajat) dengan institusi terkait. Aspek regulasi, lebih mengikat kedalam, institusi terkait memiliki kebijakan masing-masing. Aspek sarana dan prasarana, gudang barang sitaan dan barang rampasan belum sesuai dengan stadarisasi. Aspek sumber daya manusia, belum memiliki petugas penilai yang bersertifikasi.

Kata Kunci:Optimalisasi Tata Kelola, Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Muhaimin (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2, Juli 2018

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar, juga peranan komisi informasi di daerah terkait keterbukaan informasi publik dalam menunjang pelayanan publik. Tulisan ini menggambarkan keterkaitan antara keterbukaan informasi dan pelayanan publik, ternyata keterbukaan informasi dapat menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik, oleh karena itu kehadiran komisi informasi di daerah menjadi sangat penting untuk menyelesaikan sengketa informasi di daerah guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi isu utama di beberapa daerah sedangkan beberapa daerah lain belum menjadikan keterbukaan informasi dan partisipasi sebagai isu penting. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan perlu segera membentuk Komisi Informasi di seluruh Provinsi

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Sengketa, Komisi Informasi

